

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak bagi semua penduduk yang pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pembangunan daerah dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, sedangkan akar dan tujuan pembangunan negara ditentukan oleh pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Dapat menekan penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari pembangunan nasional. Kemiskinan adalah masalah besar terkait dengan beberapa aspek diantaranya politik, budaya, ekonomi lingkungan dan periode. Kemiskinan diartikan yaitu saat keadaan individu atau kelompok masyarakat dari jenis laki-laki ataupun perempuan mengalami kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berguna untuk bertahan hidup dan meningkatkan perekonomian yang lebih baik.²

² Khusnul Fikri et. al, "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 8, no. 2 (2019): 257-69.

Kemiskinan selalu menjadi masalah dalam perekonomian. Kemiskinan dapat menurunkan taraf hidup penduduk sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi terbatas. Tidak sedikit orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak sedikit orang yang hidup dibawah pendapatan rendah. Banyak program bantuan pemerintah yang dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan, namun terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan. Banyak penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan, seperti kondisi geografis, faktor budaya masyarakat setempat dan berbagai masalah lain yang mempengaruhinya.³ Disisi lain, kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pendapatan dan konsumsi, melainkan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ketidak berdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh sebab itu pemberantasan persoalan kemiskinan wajib menjadi keutamaan dalam pembangunan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Dalam mengatasi masalah tingkat kemiskinan tidak terlepas dari masalah pengangguran, jumlah penduduk,

³ Marito Ritonga and Tri Wulantika, "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)", *Jurnal Diversita* 6, no.1 (2020): 95-102.

pendidikan, kesehatan dan isu-isu yang erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting diketahui untuk menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi dapat meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah yang akan berdampak pada masyarakat miskin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, pendampingan, program dan kegiatan pemberdayaan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dibelahan dunia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Sebagai negara berkembang tentu bukan hal yang aneh jika dinegara tersebut masih memiliki warga yang hidup dalam garis kemiskinan atau dibawah garis kemiskinan. Karena pada kenyataanya negara yang dianggap maju masih memiliki jumlah penduduk miskin diwilayahnya. Kebijakan dan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan secara umum belum terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan. Dalam kebijakan yang terkonsep cukup ideal, implementasinya juga masih menemui banyak kendala. Pemerintah Daerah ditantang untuk lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini melalui kebijakan dan program yang inovatif, kebijakan yang berbasis serta berpihak pada karakter dan kondisi faktual masyarakat di daerah, dan kebijakan yang efektif serta sinergi antara satuan kerja

dalam memperkuat perekonomian kelas bawah. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak Pro-kemiskinan hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga akan menjadi permasalahan yang cukup penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini.

Periode 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika signifikan dalam tingkat kemiskinan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Pada September 2020, persentase penduduk miskin mencapai 10,19% setara dengan 27,55 juta orang, meningkat akibat dampak pandemi COVID-19, yang mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi dan implementasi berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah, angka kemiskinan mulai menurun. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,36%, dengan jumlah 25,90 juta orang. Penurunan ini berlanjut hingga September 2023, dimana persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,36%, menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Analisis ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat dan kondisi ekonomi yang membaik dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.⁴

Tingginya jumlah penduduk miskin dapat dianggap sebagai tolak ukur yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Permasalahan jumlah penduduk miskin ini juga melanda seluruh provinsi di

⁴ 'Badan Pusat Statistik (BPS)' <https://www.bps.go.id> [accessed 23 Mei 2025].

Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satunya. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dari 38 provinsi lainnya, yaitu sebesar 41,53 juta jiwa. Tingginya angka penduduk di Provinsi Jawa Timur ini dapat memunculkan masalah ekonomi yang cukup serius, salah satunya adalah tingginya angka jumlah penduduk miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin ini adalah masalah yang cukup sulit untuk dipecahkan sehingga masalahnya selalu ada dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus meningkat terutama di Provinsi Jawa Timur, namun kepadatan penduduk ini tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan minimnya permintaan akan tenaga kerja sehingga sulit bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena tidak adanya pemasukan atau pendapatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Timur angkanya mencapai 4,189 juta jiwa (10,35%) per Maret 2023. Angka tersebut membuat Jawa Timur termasuk dalam salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jawa Timur berada di tempat pertama sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia disusul dengan Provinsi Jawa Tengah di tempat kedua dan Provinsi Jawa barat ketiga.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023
1	Pacitan	14,54	15,11	13,8	13,65
2	Ponorogo	9,95	10,26	9,32	9,53
3	Trenggalek	11,62	12,14	10,96	10,63
4	Tulungagung	7,33	7,51	6,71	6,53

5	Blitar	9,33	9,65	8,71	8,69
6	Kediri	11,4	11,64	10,65	10,72
7	Malang	10,15	10,5	9,55	9,45
8	Lumajang	9,83	10,05	9,06	8,93
9	Jember	10,09	10,41	9,39	9,51
10	Banyuwangi	8,06	8,07	7,51	7,34
11	Bondowoso	14,17	14,73	13,47	13,34
12	Situbondo	12,22	12,63	11,78	11,9
13	Probolinggo	18,61	18,91	17,12	17,19
14	Pasuruan	9,26	9,7	8,96	9,24
15	Sidoarjo	5,59	5,93	5,36	5
16	Mojokerto	10,57	10,62	9,71	9,8
17	Jombang	9,94	10	9,04	9,15
18	Nganjuk	11,62	11,85	10,7	10,89
19	Madiun	11,46	11,91	10,79	11,04
20	Magetan	10,35	10,66	9,84	9,8
21	Ngawi	15,44	15,57	14,15	14,4
22	Bojonegoro	12,87	13,27	12,21	12,18
23	Tuban	15,91	16,31	15,02	14,91
24	Lamongan	13,85	13,86	12,53	12,42
25	Gresik	12,4	12,42	11,06	10,96
26	Bangkalan	20,56	21,57	19,44	19,35
27	Sampang	22,78	23,76	21,61	21,76
28	Pamekasan	14,6	15,3	13,93	13,85
29	Sumenep	20,18	20,51	18,76	18,7
30	Kota Kediri	7,69	7,75	7,23	7,15
31	Kota Blitar	7,78	7,89	7,37	7,3
32	Kota Malang	4,44	4,62	4,37	4,26
33	Kota Probolinggo	7,43	7,44	6,65	6,48
34	Kota Pasuruan	6,66	6,88	6,37	6,6
35	Kota Mojokerto	6,24	6,39	5,98	5,77
36	Kota Madiun	4,98	5,09	4,76	4,74
37	Kota Surabaya	5,02	5,23	4,72	4,65
38	Kota Batu	3,89	4,09	3,79	3,31
	Jawa Timur	11,09	11,4	10,38	10,35

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data BPS di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan dari tahun 2020-2023 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang menduduki posisi taratas yaitu Kabupaten Sampang dengan presentase sebesar

22,47% angka ini melebihi angka presentase Provinsi Jawa Timur. Posisi kedua diikuti oleh Kabupaten Bangkalan dengan presentase sebesar 20,23%, sedangkan di posisi terbawah yaitu Kota Batu dengan presentase 3,77%. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat pendidikan, naik turunnya ekonomi, dan bertambahnya jumlah pengangguran yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan “Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis formal yang pernah dijalani”.⁵ Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Secara tidak langsung pendidikan juga berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga akan mencapai standar hidup yang lebih baik. Pendidikan merupakan hak dasar yang diatur dalam konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, tepatnya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

⁵ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Sosial*, (Jakarta: BPS-RI, 2021), p. 3

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan pendidikan dengan tingkat yang semakin tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Sedangkan tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang akan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁶ Indikator tingkat pendidikan untuk mengukur pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah dengan menggunakan rata-rata lama sekolah.

Tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dari tahun ketahun namun masih ada wilayah yang rata-rata lama sekolahnya masih sangat kurang seperti di Kabupaten Sampang yaitu 4,85 tahun di tahun 2020 dan mengalami kenaikan sampai 5,07 tahun pada tahun 2023. Angka tersebut masih sangat kurang dalam pendidikan yang memadai, penyebab rendahnya tingkat pendidikan yaitu diantaranya banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di usia dini dan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan serta memilih untuk bekerja.

Penyebab kemiskinan lainnya adalah pengangguran. Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah

⁶ Cokorda Istri Dian Purnama Yanthi and AAIN Marhaeni, "Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali", *Jurnal Piramida* 11, no. 2 (2015): 68-75.

bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan dan sejahtera, namun didalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.⁷ Meningkatnya angka pengangguran telah menimbulkan masalah besar, terutama di negara-negara berkembang. Pengangguran yang berlangsung cukup lama dan berkelanjutan akan menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat, semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan, karena tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rasio ketergantungan antara pekerja dan pengangguran tinggi.

Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), karena pemerintah sering menggunakan indikator utama ini untuk mengukur keberhasilannya di bidang ketenagakerjaan, terutama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk mengukur tingkat pengangguran, dimana TPT adalah rasio dari total pengangguran terhadap total angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan yang signifikan dari yang awalnya 5,84% di tahun 2020 menjadi 4,88% pada tahun 2023, ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan berhasil dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) walaupun belum maksimal, di tahun 2020 yang nilai presentase pengangguran paling tinggi dari tahun berikutnya juga disebabkan pandemi Covid-19 yang

⁷ Edyson Susanto et. al, "Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan", *Inovasi* 13, n0. 1 (2017): 19-27.

mengakibatkan masyarakat sulit dalam mencari pekerjaan ataupun bekerja, dengan hilangnya pandemi Covid-19 perekonomian menjadi berjalan dengan stabil dan masyarakatpun dapat mencari pekerjaan dan bekerja kembali seperti tahun sebelumnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, karena merupakan salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam kurun waktu tertentu tidak dapat menstabilkan keadaan di suatu wilayah. Secara makro pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti pendapatan wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arius Jonnadi, menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dijelaskan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan semakin menurun. Pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan dampak terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁸

⁸ Arius Jonaidi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan", *Kajian Ekonomi* I, no. April (2012): 140-64.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah. Pertumbuhan itu sendiri merupakan peningkatan jangka panjang dalam output per kapita yang disertai aspek-aspek dinamis dari perekonomian.

Diketahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami naik turun, dapat dilihat pada tahun 2020 angka pertumbuhan ekonomi mencapai -4,4% dan Kota Madiun sebagai kota di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah sampai -13,86%, hal ini sebagian besar terjadi karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan pergerakan masyarakat serta aktivitas *supply and demand* menurun, sehingga tidak dapat menciptakan nilai tambah atau keuntungan bagi masyarakat, dunia bisnis, dan semua sektor usaha. Pada tahun berikutnya perekonomian mulai berjalan ke arah stabil dengan angka 2,76% karena dapat mengatasi pandemi Covid-19, di tahun 2022 saat hilangnya pandemi perekonomian mulai berjalan seperti tahun sebelum terkena pandemi yang dipimpin Kabupaten Tuban dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,21%, walaupun tetap terjadi naik turun dalam pertumbuhan ekonomi seperti di tahun 2023 yang turun di angka 4,19% yang di tahun sebelumnya yaitu 2022 sebesar 4,55%. Hal ini harus tetap dilakukan perbaikan agar seluruh masyarakat dapat terjamin kesejahteraannya dan dapat mengatasi tingkat kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat**

Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2023”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih terhitung banyak yang menunjukkan masih kurangnya standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran pendidikan dalam pekerjaan.
3. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pengetahuan membuat tingginya pengangguran di Jawa Timur.
4. Pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak stabil.

Penelitian ini hanya berfokus pada variabel pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada penelitian ini periode data yang digunakan yaitu periode 2020-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian adalah;

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023?
4. Apakah tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan;

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023.
3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah pengetahuan serta wawasan lebih mengenai pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini, berguna untuk meningkatkan kadar keilmuan, menambah wawasan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dalam hal intelektual dan mampu menganalisis teori-teori yang telah diperoleh pada perkuliahan untuk dapat dikaitkan pada permasalahan ekonomi.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu di bidang ekonomi syariah untuk bahan referensi dan rujukan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan dan peningkatan bagi peneliti dimasa yang akan datang

dalam membahas variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang memberikan pengaruh terhadap kemiskinan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang dapat memudahkan dalam melaksanakan penelitiannya agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (variabel terikat) yaitu tingkat kemiskinan (Y) dan variabel independen (variabel bebas) yaitu pendidikan (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3). Populasi yang diambil adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Penegasan ini sesuai dengan “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023” penjelasan ini agar dapat lebih dipahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori yang ada, maka diuraikan terlebih dahulu istilah tentang penelitian ini, sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Menurut Pasal 1 UU 20/2003 Tentang Sisdiknas mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan sistematis guna menciptakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dengan aktif, baik dari segi jasmani(fisik) maupun rohani yang dibutuhkan oleh diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.⁹

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengangguran sebagai kondisi manusia yang tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan definisi pengangguran terbuka adalah anggota populasi usia kerja yang belum dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu tetapi bersedia mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan.¹⁰

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.¹¹ Selain dinilai dengan skala nasional, pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada skala regional. Pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB.

⁹ Riani, "Pentingkah Pendidikan?", Pustaka Taman Ilmu, (2021).

¹⁰ Rivai,S. (2019), Mari Belajar Ekonomi: Buku Peminatan Ilmu Sosial Kelas XI, Uwais Literasi Indonesia.

¹¹ S. Sukirno, Makroekonomi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 65.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional memberikan batasan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana variabel akan diukur, seperti langkah-langkah yang harus diikuti, instrumen yang digunakan, dan kriteria yang harus dipenuhi. Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023”, maka secara operasional peneliti memiliki maksud untuk menguji seberapa berpengaruh variabel tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi acuan dasar suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan, maka ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utamanya terdiri dari: Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, populasi, sampling dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

Bab V Hasil Penelitian dalam bab ini membahas tentang penjelasan dari hasil masing-masing pengaruh variabel efisiensi, variabel keamanan, variabel risiko terhadap variabel keputusan penggunaan, serta hasil analisis data mengenai pengaruh secara simultan variabel efisiensi, variabel keamanan, variabel risiko, terhadap variabel keputusan penggunaan.

Bab VI Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir membahas tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.